



WALIKOTA MAGELANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR 46 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 43 TAHUN 2011  
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN 2011-2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan diperlukan adanya alat ukur yang akuntabel untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kota Magelang;
- b. bahwa sebagian indikator kinerja Pemerintah Kota Magelang sebagaimana tercantum pada Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2011 bertentangan dengan Standar Pelayanan Minimal dari masing-masing kementerian;
- c. bahwa terdapat beberapa indikator kinerja yang tidak memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik sehingga perlu untuk disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Magelang Tahun 2011-2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- 12 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
- 13 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2011-2015;
- 14 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
- 16 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- 17 Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
- 19 Peraturan Menteri Sosial Nomor 29/huk/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
- 20 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/ Kota;
- 21 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten/Kota;
- 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 24 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- 25 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
- 26 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

- 27 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor Pm.106 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian;
- 28 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
- 29 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 30 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota;
- 31 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
- 32 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
- 33 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan;
- 34 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 43 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN 2011-2015

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Magelang Nomor 43 Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Magelang Tahun 2011-2015 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 43) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 15 Desember 2014

WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 15 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA MAGELANG,

SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2014 NOMOR 47

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
Ka. Bagian	
Ka. Sub Bag.	

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
 NOMOR 46 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA  
 MAGELANG NOMOR 43 TAHUN 2011 TENTANG  
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOTA  
 MAGELANG TAHUN 2011-2015

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
 TAHUN 2011-2015

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4
MISI 1: Menciptakan Pemerintahan yang bersih dan profesional dengan peningkatan kapasitas dan responsifitas aparatur yang didasarkan pada nilai-nilai kebenaran dan berkeadilan			
1	Terwujudnya peningkatan pengelolaan administrasi perkantoran dengan baik dan tertib dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang professional menuju pelayanan publik yang prima	1 Rasio pemenuhan sarana prasarana perkantoran	Semua SKPD
		2 Penerapan e-Government yang diukur :	
		-Procurement (LPSE)	Dishubkominfo
		- Jumlah SKPD yang menggunakan Sistem Informasi	Dishubkominfo
		- Jumlah SKPD yang memiliki website	Dishubkominfo
		- WAN (Wide Area Network) setiap SKPD	Dishubkominfo
		- Penggunaan software legal/ OSS di setiap SKPD	Dishubkominfo
3 Presentase SKPD yang melaksanakan arsip baku	Kantor Litbang & Statistik		
2	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, responsive, bertanggungjawab dan akuntabel	1 Hasil opini BPK untuk Laporan Keuangan	Inspektorat
		2 Tingkat ketertiban administrasi pelaksanaan pembangunan dan keuangan	Inspektorat
		3 Index Kepuasan Masyarakat (IKM)	Setda (Organisasi)
3	Terwujudnya pelayanan publik cepat, transparan, dan adil	1 Penyelesaian aduan masyarakat	Setda & unit-unit pelayanan langsung
		2 Rasio bayi berakte kelahiran	Dispendukcapil
		3 Rasio pasangan berakte nikah	Dispendukcapil
		4 Cakupan penerbitan Kartu Keluarga ( KK )	Dispendukcapil
		5 Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk ( KTP )	Dispendukcapil
		6 Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran	Dispendukcapil

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggung Jawab	
1	2	3	4	
4	Perlakuan aparatur yang mencerminkan nilai-nilai <i>good governance</i> (adil, transparan, penegakkan hukum, menghormati ham) dalam memberikan pelayanan publik	1	Tingkat pelanggaran etika aparat yg mencakup:	
			- Persentase PNS yang mendapat hukuman disiplin	BKD
			- Persentase Rata-rata tingkat kehadiran PNS dalam 1 Tahun	BKD
		- Penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS	BKD	
5	Terwujudnya peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik	1	Tingkat Konsistensi Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD	Bappeda
		2	Program dalam BA Hasil Musrenbang yang diakomodir RKPD	Bappeda
6	Terwujudnya hubungan resiprositas (timbang balik) antara pemerintah, DPRD, dunia usaha, masyarakat berbasis demokrasi dan transparansi informasi (penghormatan hak asasi, penegakkan hukum, dan pemenuhan kewajiban tanggungjawab pada publik)	1	Media Informasi Pemda yang dapat bh diakses publik	Dishubkominfo, Setda (Humas)
7	Terwujudnya peningkatan penegakan hukum dan kepastian hukum yang adil bagi semua	1	Tingkat penyelesaian permasalahan hukum	Setda (Hukum)
		2	Cakupan penegakan peraturan kepala daerah	Satpol PP
8	Meningkatnya ketaatan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan	1	Ditetapkannya Perda APBD tepat waktu	DPPKD
		2	Kesesuaian kelembagaan SKPD dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Setda (organisasi)
MISI 2: Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan mendorong tumbuhnya iklim investasi untuk pengembangan usaha yang mampu membuka peluang penyerapan tenaga kerja yang luas bagi masyarakat				
1	Terwujudnya peningkatan keterpaduan sumber pendanaan baik dari pusat, provinsi dan daerah.	1	Rasio dana DAK, TP, Dekonsentrasi dan dana hibah serta dana bantuan lainnya terhadap total APBD	Setda (Pembangunan)
2	Terwujudnya peningkatan	1	Rasio nilai asset daerah yang terdata	Setda didukung seluruh SKPD

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3		4
3	Terwujudnya peningkatan kemudahan akses pendanaan melalui lembaga-lembaga keuangan serta membangun kemitraan dalam memanfaatkan skema pendanaan	1	Jumlah dan jenis bank dan cabang perusahaan asuransi	Setda (Perekonomian)
		2	Tingkat Perkembangan BUMD	Setda (Perekonomian)
		3	Jumlah inovasi/diversifikasi produk BUMD	Setda (Perekonomian)
4	Terwujudnya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah.	1	Jumlah dan macam pajak	DPPKD
		2	Rasio PAD terhadap APBD	DPPKD
5	Terwujudnya peningkatan kerjasama antar daerah dalam hal investasi.	1	Jumlah dan jenis kerjasama antar daerah yang berhasil dijalin	KPM
6	Terwujudnya peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	1	Bertambahnya laju pertumbuhan investasi	KPM
		2	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN	KPM
7	Terwujudnya peningkatan kemudahan pelayanan dalam mendorong peluang investasi di daerah	1	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	KPM
		2	Lama proses perijinan	BP2T
8	Terwujudnya pembangunan kepercayaan/komitmen antara stakeholder dengan dunia usaha.	1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	KPM
		2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	KPM
9	Terwujudnya pengembangan infrastruktur kawasan strategis dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian kota	1	Bertambahnya jumlah pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh	KPM
10	Terwujudnya kemitraan dengan memanfaatkan skema pendanaan melalui Kerjasama pemerintah dan swasta	1	Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan : Antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat kabupaten/kota dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional	Diskoperindag
11	Terwujudnya identifikasi investasi swasta	1	Nilai investasi swasta	KPM
12	Menyediakan data dan informasi ketenagakerjaan yang aksesibel dan akurat	1	Sebaran informasi bursa kerja yang terupdate	Disnakertransos
13	Terwujudnya pembangunan BLK di tingkat Kota	1	Perencanaan manajemen dan operasional BLK	Disnakertransos

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3		4
14	Terwujudnya peningkatan jumlah penempatan tenaga kerja	1	Prosentase pencari kerja yang ditempatkan	Disnakertransos
		2	Rasio daya serap tenaga kerja	Disnakertransos
15	Terwujudnya peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	1	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Disnakertransos
		2	Tingkat pengangguran terbuka	Disnakertransos
		3	Calon tenaga kerja yang terdidik (pencari kerja terlatih)	Disnakertransos
16	Terwujudnya peningkatan perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	1	Angka perselisihan pengusaha pekerja per tahun	Disnakertransos
		2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Disnakertransos
17	Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan	1	Jumlah LKS Bipartit	Disnakertransos
		2	Besaran pemeriksaan perusahaan	Disnakertransos
18	Terwujudnya peran serta dan partisipasi lembaga-lembaga pendidikan dalam penyiapan kualitas tenaga kerja	1	Jumlah lembaga penyelenggara pelatihan kerja berperan aktif dalam peningkatan kualitas produktivitas tenaga kerja.	Disnakertransos
19	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan pekerja	1	Prosentase Pencapaian UMK terhadap KHL	Disnakertransos
		2	Prosentase penurunan kasus-kasus ketenagakerjaan di Kota Magelang, baik kasus perselisihan hubungan industrial maupun kasus TKI	Disnakertransos
20	Terciptanya wirausaha baru	1	Jumlah wirausaha baru	Disnakertransos
21	Terlindunginya hak-hak keselamatan tenaga kerja	1	Prosentase perusahaan yang telah menerapkan norma keselamatan dan perlindungan ketenagakerjaan	Disnakertransos
		2	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Disnakertransos
MISI 3: Memperkuat dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian kerakyatan dengan mengoptimalkan potensi daerah yang didukung oleh kemandirian masyarakat				
1	Terwujudnya pertambahan pelaku usaha di sektor riil (berbagai bidang usaha).	1	Jumlah usaha Sektor riil yang berkembang	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
2	Terwujudnya peningkatan akses permodalan bagi pelaku usaha ekonomi kerakyatan	1	Jumlah pelaku usaha ekonomi kerakyatan menerima akses permodalan	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
3	Tersedianya kawasan PKL yang tertata sesuai rencana tata ruang	1	Jumlah sektor informal / PKL yang tertata	DPP / Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3		4
4	Terwujudnya peningkatan kemampuan kelembagaan PKL sebagai potensi ekonomi kerakyatan	1	Jumlah kelembagaan PKL yang tertib administrasi	DPP
5	Tersedianya pangan yang cukup baik dari segi jumlah maupun mutunya, aman, merata, halal dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.	1	Ketersediaan pangan utama	BPMPKB, Dispertan
		2	Cakupan beras bersubsidi pada KK miskin	BPMPKB, Setda, Kec., Kel.
		3	Ketersediaan energi dan protein perkapita	
			a. Ketersediaan energi ( Kkal/kap/th)	BPMPKB, Dispertan
			b. Ketersediaan protein ( gr/kap/th )	BPMPKB, Dispertan
		4	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan	BPMPKB, Dispertan
6	Terwujudnya peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui gerakan percepatan diversifikasi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	1	Tingkat diversifikasi konsumsi Pangan yang beragam bergizi, seimbang dan aman	BPMPKB
		2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Didukung Dinas Pertanian, Diskoperindag
7	Terwujudnya peningkatan produktifitas UMKM melalui pemanfaatan teknologi dan pemenuhan sarana prasarana usaha	1	Jumlah UMKM yang sudah memanfaatkan teknologi dan terpenuhi sarana prasarana	Diskoperindag
		2	Persentase UMKMK yang produktif	Diskoperindag
8	Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi sesuai dengan jati diri koperasi	1	Prosentase Koperasi Aktif	Diskoperindag
		2	Jumlah koperasi	Diskoperindag
9	Terwujudnya perluasan pangsa pasar UMKM	1	Jumlah promosi UMKMK	Diskoperindag
		2	Jumlah kontak dagang dan temu usaha.	Diskoperindag
10	Terwujudnya perkembangan jumlah UMKM dan daya saing usaha.	1	Jumlah UMKMK, Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	Diskoperindag
11	Bertambahnya volume fasilitasi kredit yang bisa diakses UMKM	1	Jumlah UMKMK yang memanfaatkan kredit	Diskoperindag
12	Terwujudnya SDM pertanian, peternakan dan perikanan yang berkualitas	1	Rasio petani terlatih	Dinas Pertanian
		a.	Pertanian	Dinas Pertanian
		b.	Peternakan	Dinas Pertanian
		c.	Perikanan	Dinas Pertanian
		2	Cakupan bina kelompok tani	Dinas Pertanian
13	Terwujudnya peningkatan jenis usaha agribisnis	1	Jumlah jenis bidang usaha agribisnis	Dinas Pertanian

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3		4
14	Terfasilitasinya pengolahan hasil, pasca panen dan pemasaran	1	Jumlah tempat pengolahan pasca panen:	Dinas pertanian
		a.	Pertanian	Dinas Pertanian
		b.	Peternakan	Dinas Pertanian
		c.	Perikanan	Dinas Pertanian
15	Termanfaatkannya tanah bengkok untuk pengembangan agribisnis.	1	Prosentase konservasi sumberdaya lahan dan sumber daya hayati	Dinas Pertanian
16	Tersusunnya strategi optimalisasi pemanfaatan lahan sawah untuk agribisnis tanaman pangan	1	Prosentase pemanfaatan lahan	Dinas Pertanian
17	Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas produksi pertanian (pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan)	1	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Dinas pertanian
18	Terwujudnya peningkatan produk hasil ternak baik secara kuantitas dan kualitas.	1	Jumlah produksi peternakan	Dinas pertanian
		a.	Daging (kg)	
		b.	Telor (kg)	
		c.	Susu (lt)	
		2	Produksi perikanan kelompok petani	
19	Terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan hewan dan kesmavet	1	Jumlah ternak yg diperiksa kesehatannya	Dinas Pertanian
		2	Jumlah pemeriksaan dan pengawasan lalu lintas ternak	Dinas Pertanian
20	Teridentifikasinya kondisi sosial ekonomi petani Kota Magelang	1	Penguatan kelembagaan petani	Dinas Pertanian
		a.	Pertanian	
		b.	Peternakan	
21	Terwujudnya intensifikasi pertanian dengan menggunakan varietas unggul baru	1	Jumlah penggunaan benih padi bermutu	Dinas Pertanian
		1	Jumlah serangan OPT yang dapat diatasi	Dinas Pertanian
		1	Jumlah populasi ternak	Dinas Pertanian
		a.	Unggas	Dinas Pertanian
23	Tersedianya benih/ bibit berkualitas.	b.	Domba/kambing	Dinas Pertanian
		c.	Sapi	Dinas Pertanian
		1	jumlah penggunaan teknologi tepat guna (Panca usaha tani )	Dinas Pertanian
24	Terwujudnya peningkatan penggunaan sarana dan prasarana produksi komoditas pangan	1		Dinas Pertanian
25	Terwujudnya peningkatan perlindungan hutan	1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Dinas Pertanian
		2	Konservasi kawasan hutan sebesar	Dinas Pertanian
		3	Kerusakan kawasan hutan	Dinas Pertanian

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggung Jawab	
1	2	3	4	
MISI 4: Meningkatkan Pembangunan pelayanan perkotaan dengan pengembangan budaya daerah disertai dengan peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan aspek kemandirian				
1	Tersedianya kelengkapan Rencana Tata Ruang dari RTRW, RDTRK, RTH dan RTBL	1	Tersedianya dokumen RTRW dan Perda RTRW 2010 -2030, RDTRK dan Perda RDTRK 2010 -2020, RTH, dan RTBL Kawasan Strategis Lingkungan Hidup (Gunung Tidar)	Bappeda
		2	Tersedianya sarana informasi Rencana tata Ruang Wilayah Kota Magelang kepada masyarakat	Bappeda
		3	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	Bappeda
		4	Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	DKPTK/Bappeda
2	Terwujudnya peningkatan kualitas Prasarana/ infrastruktur Perkotaan	1	Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	DPU
		2	Rasio Pasar Tradisional dalam kondisi baik	DPP
		3	Prosentase penanganan sampah di TPSA (pengolahan sanitary landfill)	DKPT
		4	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	DKPT
		5	Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan.	DKPT
3	Terwujudnya engembangan Infrastruktur perumahan	1	Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari.	DPU
		2	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.	DPU
		3	Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari	DPU
		4	Lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	DPU, DKK
		5	Rumah tangga pengguna air bersih	DPU, DKK, Kec., Kel.
4	Terwujudnya peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	DKPT
		2	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	DKPT
		3	Penegakan hukum lingkungan hidup	KLH
		4	Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai	KLH

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggung Jawab	
1	2	3	4	
		5	Prosentase (%) Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air	KLH
		6	Prosentase (%) Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara	KLH
		7	Prosentase (%) luasan lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa	KLH
5	Terwujudnya pengembangan infrastruktur Kawasan Strategis	1	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh sebanyak sebanyak 4 Kawasan yaitu GOR Samapta, Sidotopo, Sentra Ekonomi Lembah Tidar, dan Alun-alun	DPU
6	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Infrastruktur Transportasi Angkutan Darat	1	Jumlah sarana prasarana lalu lintas jalan raya (APPIL)	Dishubkominfo
		2	Tersedianya Sarana dan Prasarana serta fasilitas Terminal tipe A dg kondisi yg baik di Kota Magelang	Dishubkominfo
		3	Rasio prasarana parkir dengan kondisi baik	Dishubkominfo
		4	Jumlah uji KIR angkutan umum dan angkutan barang di Kota Magelang	Dishubkominfo
		5	Rasio kepemilikan KIR angkutan umum	Dishubkominfo
		6	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	Dishubkominfo
		7	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	Dishubkominfo
		8	Jumlah tempat-tempat pemberhentian Angkutan Umum (Halte/Sub terminal yang ada di Kota Magelang)	Dishubkominfo
		9	Rasio ijin trayek	Dishubkominfo
7	Terwujudnya prasarana komunikasi dan informasi masyarakat yang berkelanjutan	1	Jumlah jaringan komunikasi operator dengan kondisi baik	Dishubkominfo, Setda
		2	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Dishubkominfo
		3	Tersedianya / Jumlah Hot Spot pada ruang terbuka publik di Kota Magelang	Dishubkominfo
8	Tercapainya peningkatan daya saing dan daya jual destinasi pariwisata guna meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada wisatawan	1	Pertumbuhan jumlah Kunjungan wisata	Disbudparpora
		a.	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Disbudparpora
		b.	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Disbudparpora

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3		4
9	Terdatanya lembaga/ kelompok seni dan budaya.	1	Jumlah kelompok seni dan budaya yang ada di seluruh Kota Magelang	Disbudparpora
10	Terwujudnya peningkatan pembinaan lembaga/ kelompok seni dan budaya.	1	Cakupan kajian seni 50%	Disbudparpora
		2	Cakupan fasilitas seni 30%	Disbudparpora
		3	Cakupan gelar seni 75%	Disbudparpora
		4	Misi kesenian 100%	Disbudparpora
		5	Cakupan organisasi 34%	Disbudparpora
11	Terpeliharanya Museum dan peninggalan purbakala, serta cagar budaya.	1	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Disporabudpar
12	Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	BPMPKB
		2	LPM berprestasi	BPMPKB
		3	pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	BPMPKB
13	Terwujudnya peningkatan pengembangan kreativitas dan inovasi teknologi terapan masyarakat	1	Kelurahan yang menerapkan TTG (Teknologi Tepat Guna)	BPMPKB
		2	Jumlah Krenova yang terdata	KanLitbangstat
14	Terwujudnya perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat	1	Jumlah LKK dan lembaga keuangan masyarakat yang sehat dan berkualitas	BPMPKB, Setda
15	Terlaksananya review pokjnal orientasi kader dan pemilihan posyandu berprestasi	1	Posyandu aktif	BPMPKB
		2	Jumlah posyandu yang berprestasi	BPMPKB, Kec., Kel.
16	Meningkatnya koordinasi dan kinerja TKPK secara sinergis	1	Jumlah rakor dan monev TKPK	Bappeda
17	Meningkatnya kualitas program PNPM	1	Jumlah LKM yang dapat dapat melaksanakan program dengan baik	BPMPKB, Setda
18	Terlaksananya PMTAS	1	Jumlah anak sekolah yang mendapatkan PMTAS	BPMPKB, DIKNAS
19	Terwujudnya peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	BPMPKB, Setda
		2	rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	BPMPKB
		3	Partisipasi angkatan kerja perempuan	BPMPKB, Disnakertransos
		4	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	BPMPKB
		5	cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	BPMPKB, Setda (Kesra)
		6	Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas	BPMPKB, Setda (Kesra)

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4
MISI 5: Mendorong Peningkatan derajat kesehatan, pengembangan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia yang cerdas, terampil, kreatif, inovatif dan memiliki etos kerja yang tinggi			
1	Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya kesehatan	1 Rasio dokter persatuan penduduk	DKK
		2 Rasio tenaga medis persatuan penduduk	DKK
2	Terwujudnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan	1 Cakupan Puskesmas	DKK
		2 Cakupan Pembantu Puskesmas (PUSTU)	DKK
		3 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	DKK
		4 rasio Rumah sakit persatuan penduduk	DKK
		5 Terwujudnya RSUD Tidar terakreditasi 16 pelayanan yang menjadi rujukan bagi daerah sekitar	DKK
		6 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota	DKK
3	Terwujudnya peningkatan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat	1 Angka kelangsungan hidup bayi	DKK
		2 Angka usia harapan hidup	DKK
		3 Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	DKK
		4 Angka kematian bayi	DKK
4	Terwujudnya peningkatan gizi masyarakat	1 Persentase balita gizi buruk	DKK, Kec., Kel.
		2 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	DKK
5	Berkurangnya kasus penyakit menular	1 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA.	DKK
		2 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	DKK
		3 Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	DKK
6	Terwujudnya peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	1 Prosentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan	DKK
7	Terwujudnya peningkatan jaminan keamanan obat dan makanan bagi kesehatan masyarakat	1 Prosentase jumlah obat dan makanan yang mendapatkan uji keamanan sehingga aman dikonsumsi masyarakat	RSU, DKK
		2 Prosentase penurunan angka korban keracunan obat dan makanan.	RSU, DKK

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3		4
8	Terwujudnya peningkatan cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan	1	Cakupan Jaminan pemeliharaan kesehatan Keluarga Miskin dan Masyarakat Rentan	DKK, Kec., Kel.
		2	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin.	DKK
		3	Kepemilikan kartu Jamkesda	DKK, Kec., Kel.
		4	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	DKK
9	Terwujudnya peningkatan kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan	1	Cakupan Rumah tangga sehat	DKK
		2	Cakupan Kelurahan Siaga Aktif, Strata 3	DKK
10	Terciptanya lingkungan hidup yang sehat	1	Penyediaan air bersih dan sanitasi dasar	DKK
		2	Pengawasan lingkungan Industri Rumah Tangga	DKK
		3	Rasio Pengembangan wilayah sehat (Permukiman, Obyek Wisata, Industri Rumah Tangga)	DKK
11	Terkendalinya pertumbuhan penduduk serta meningkatnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera	1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	BPMPKB, Kec., Kel.
		2	Rasio akseptor KB	BPMPKB, Kec., Kel.
		3	Cakupan peserta KB aktif	BPMPKB, Kec., Kel.
		4	Peserta KB Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I	BPMPKB, Kec., Kel.
		5	Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif 65%	BPMPKB, Kec., Kel.
		6	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) 5%	BPMPKB, Kec., Kel.
12	Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	1	Jumlah sarana sosial (panti jompo, panti asuhan, panti rehabilitasi)	Disnakertransos
		2	Persentase (%) panti sosial skala kab/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Disnakertransos
		3	Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Disnakertransos
		4	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Disnakertransos

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3		4
13	Terwujudnya peningkatan pembinaan eks penyandang penyakit sosial	1	Prosentase penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Disnakertransos
		2	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Disnakertransos
14	Terwujudnya peningkatan pemerataan, akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD).	1	APK PAUD	Dinas Pendidikan
		2	20% anak usia 4-6 tahun mengikuti program TK/RA	Dinas Pendidikan
		3	90% TK/RA memiliki sarana dan prasarana belajar/ bermain	Dinas Pendidikan
		4	65% anak dalam kelompok 0-4 tahun mengikuti kegiatan Tempat Penitipan Anak, Kelompok Bermain atau yang sederajat	Dinas Pendidikan
		5	50% anak usia 4-6 tahun yang belum ter-layani pada program PAUD jalur formal mengikuti program PAUD jalur non formal	Dinas Pendidikan
15	Terwujudnya peningkatan pemerataan, akses dan mutu pendidikan Dasar	1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Dinas Pendidikan
		2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Dinas Pendidikan
		3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	Dinas Pendidikan
		4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	Dinas Pendidikan
		5	Angka rata-rata lama sekolah SD/MI	Dinas Pendidikan
		6	Angka rata-rata lama sekolah SMP/MTs	Dinas Pendidikan
		7	Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI	Dinas Pendidikan
		8	Angka pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs	Dinas Pendidikan
		9	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah	Dinas Pendidikan
		10	Rasio guru / murid	Dinas Pendidikan
		11	Rasio guru / murid per kelas rata-rata	Dinas Pendidikan
		12	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/Mts ke SMK/SMA/MA	Dinas Pendidikan
16	Terwujudnya peningkatan pemerataan, akses, mutu, relevansi dan daya saing jenjang pendidikan menengah	1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket B	Dinas Pendidikan
		2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket B	Dinas Pendidikan
		3	Angka rata-rata lama sekolah SMA/SMK/MA	Dinas Pendidikan
		4	Angka pendidikan yang ditamatkan	Dinas Pendidikan
		5	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK/MA	Dinas Pendidikan
		6	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	Dinas Pendidikan
		7	Rasio guru terhadap murid	Dinas Pendidikan

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3		4
		8	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	Dinas Pendidikan
		9	Penduduk yang berusia > 15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Dinas Pendidikan
		10	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMK/SMA/MA	Dinas Pendidikan
17	Terwujudnya peningkatan pemerataan, akses, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan Non formal dan Informal	1	Angka melek huruf	Dinas Pendidikan
		2	Angka rata-rata lama sekolah	Dinas Pendidikan
		a.	Dasar	Dinas Pendidikan
		b.	Menengah	Dinas Pendidikan
		3	Pendidikan kesetaraan	Dinas Pendidikan
		a.	Angka lulus Paket A	Dinas Pendidikan
		b.	Angka lulus Paket B	Dinas Pendidikan
		C	Angka lulus Paket C	Dinas Pendidikan
		4	Usia dewasa yang belum bersekolah terlayani pendidikan kesetaraan	Dinas Pendidikan
		5	Presentase pengangguran usia 15-44 th memperoleh layanan pendidikan Kecakapan Hidup	Dinas Pendidikan
		6	Persentase lembaga PNF terakreditasi c.	Dinas Pendidikan
		7	Jumlah model layanan PNF Unggulan	Dinas Pendidikan
18	Tewujudnya peningkatan pemerataan, akses, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan Khusus	1	Pendidikan khusus terakreditasi	Dinas Pendidikan
		2	Pendidik yang berkualifikasi dan Prasarana pada pendidikan khusus terpenuhi	Dinas Pendidikan
19	Tewujudnya peningkatan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan	1	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Dinas Pendidikan
		2	Pendidik yang berkualifikasi dan Prasarana pada pendidikan khusus terpenuhi	Dinas Pendidikan
20	Tewujudnya peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik pada penyelenggaraan pendidikan	1	Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO	Dinas Pendidikan
21	Tewujudnya peningkatan minat baca masyarakat	1	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	KPAD
		2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	KPAD
22	Tewujudnya peningkatan wawasan kebangsaan, kearifan lokal dan kesetaraan gender dalam penyelenggaraan pendidikan	1	Prosentase sekolah melaksanakan kurikulum Bahasa Jawa	KPAD
		2	Gap laki-laki dan perempuan dalam partisipasi pendidikan	Dinas Pendidikan
		3	Jumlah perempuan yang menduduki posisi pengambil kebijakan pendidikan meningkat	Dinas Pendidikan

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3		4
23	Tewujudnya peningkatan kualitas dan partisipasi generasi muda dalam pembangunan daerah	1	Jumlah kegiatan kepemudaan	Disporabudpar
		2	Jumlah organisasi pemuda	Disporabudpar
		3	Tersedianya 5 program kepemudaan oleh lembaga kepemudaan untuk meningkatkan kapasitas kemampuan pemuda di bidang kewirausahaan, kepemimpinan, wawasan kebangsaan, kebudayaan dan, pendidikan.	Disporabudpar
		4	Angka pengangguran pemuda 5% setiap bulan	Disporabudpar
		4	Partisipasi pemuda dalam kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi, dan kemasyarakatan meningkat 5 persen setiap tahun.	Disporabudpar
24	Terwujudnya pembibitan, pembinaan, pemanduan olah raga secara kontinyu	1	Jumlah klub olah raga	Disporabudpar
		2	Jumlah organisasi olah raga	Disporabudpar
		3	jumlah even/ kegiatan olah raga yang diselenggarakan	Disporabudpar
		4	Jumlah gedung olah raga	Disporabudpar
		5	Jumlah prestasi olah raga dalam even Nasional	Disporabudpar
		6	15 Klub Olahraga Pelajar yang dibina di wilayah kabupaten/kota.	Disporabudpar
		7	7 cabang olahraga yang dikompetisikan secara teratur minimal setiap dua tahun sekali.	Disporabudpar
MISI 6 : Mengembangkan paham kebangsaan dan meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan guna mewujudkan rasa aman dan ketentraman masyarakat				
1	Tewujudnya peningkatan kesadaran wawasan kebangsaan masyarakat	1	Frekuensi kegiatan Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI)	Badan Kesbangpolinmas
		2	Jumlah konflik bernuansa SARA	Badan Kesbangpolinmas
2	Tewujudnya dukungan lancarnya pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden, Legislatif, dan Kepala Daerah	1	Frekwensi dialog antara warga masyarakat dengan Forum Pimpinan Daerah	Badan Kesbangpolinmas
3	Tewujudnya peningkatan pembinaan politik daerah	1	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu, Pilpres, Pilkada (pembinaan politik daerah)	Badan Kesbangpolinmas
		2	Tingkat pelanggaran dalam pemilu	Badan Kesbangpolinmas
4	Tewujudnya peningkatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	1	Jumlah ormas yang mengikuti kegiatan wawasan kebangsaan di tingkat Provinsi dan Nasional	Badan Kesbangpolinmas

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3		4
5	Terwujudnya masyarakat yang hidup dengan dasar norma-norma agama.	1	Frekuensi koordinasi FKUB dan dialog antar umat agama	Badan Kesbangpolinmas
6	Tewujudnya peningkatan ketertiban dan keamanan masyarakat	1	Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	Satpol PP
		2	Angka kriminalitas yang tertangani	Badan Kesbangpolinmas,
		3	Jumlah Linmas per 10.000 penduduk	Badan Kesbangpolinmas, Kel. Kel.
		4	Petugas Linmas di Kota	Badan Kesbangpolinmas
		5	Penegakkan perda dan peraturan KDH yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Badan Kesbangpolinmas, Kel. Kel.
7	Tewujudnya peningkatan profesionalitas aparat kamtibmas, satlinmas, SAR, satpol PP	1	jumlah aparat yg mendapatkan diklat linmas/ kamtibmas/ SAR/ Satpol PP	Badan Kesbangpolinmas
8	Tewujudnya peningkatan pemahaman dan kemampuan aparatur dan masyarakat menangani resiko korban bencana	1	Tersedianya Satlinmas inti penanggulangan bencana	Badan Kesbangpolinmas
		2	Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kota	DPU, Badan Kesbangpolinmas
		3	Tingkat waktu tanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	DPU, Badan Kesbangpolinmas

WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

